

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan gelap, yang sering kali dikaitkan dengan aktivitas ilegal dan subversif, pada kenyataannya menjadi salah satu cara yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa-masa awal revolusi, ketika akses ke pasokan barang dan sumber daya sangat terbatas akibat blokade ekonomi dan pertempuran, perdagangan gelap menjadi jalan hidup yang krusial untuk menyuplai kebutuhan dasar, baik itu senjata, pangan, maupun bahan-bahan penting lainnya. Selain itu, perdagangan gelap juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang dilakukan oleh penjajah.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa melawan kolonialisme asing. Sebaliknya, Indonesia masih harus menghadapi upaya Belanda untuk merebut kembali kendali, terutama setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang seharusnya menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda, namun Indonesia justru memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1945, Indonesia memasuki periode Revolusi Kemerdekaan, sebuah fase di mana bangsa Indonesia berupaya mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi dan pertempuran fisik terbuka. Secara ekonomi, Indonesia tidak lagi berstatus jajahan Belanda, melainkan memiliki posisi sejajar sebagai bangsa merdeka. Selain itu, kembalinya Belanda ke Indonesia sebagai bentuk neokolonialisme belum didukung oleh dasar hukum internasional yang kuat.¹

Pada masa awal kemerdekaan, transisi kekuasaan yang terjadi akibat revolusi menimbulkan beragam masalah, khususnya di sektor ekonomi. Republik

¹ Cahyono dan Rizki Aldi, “ Sumber Dana Perang Revolusi Indonesia 1945-1949: Peperangan Di Jawa Dan Sumatera”, *Jejak : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, (2022), hlm,112-113.

menghadapi kelangkaan pasokan makanan dan pakaian. Selain itu, perekonomian terganggu oleh inflasi yang disebabkan oleh peredaran uang NICA di daerah yang dikuasai Sekutu, sementara mata uang Indonesia belum diterbitkan. Keseluruhan permasalahan ini berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi di seluruh wilayah Republik.²

Ketika periode 1945-1949, Indonesia berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan besar, kekacauan terjadi hampir di seluruh wilayah negeri, ketersediaan bahan pangan dan persenjataan menipis, pelayanan publik kian memburuk. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara yang baru lahir ini harus kembali menghadapi serangan lanjutan dari Belanda yang masih belum menerima negara jajahannya memproklamasikan kemerdekaan. Salah satu upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Nusantara adalah dengan melakukan blokade ekonomi. Blokade inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan perekonomian nasional saat itu.³

Kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-15 melalui jalur migrasi ke selatan, awalnya untuk misi kebudayaan, eksplorasi, dan kemudian perdagangan. Pemukiman tetap orang Tionghoa mulai terbentuk pada awal abad ke-15. Meskipun tidak semua etnis Tionghoa memiliki bakat dalam bisnis, suku Hokkien, khususnya dari provinsi Fujian bagian selatan, dikenal memiliki jiwa perdagangan yang ulet, tahan uji, dan rajin. Mentalitas ini sangat cocok sebagai pedagang dan telah tampak jelas pada orang Tionghoa di Indonesia selama berabad-abad. Mereka datang ke Indonesia dengan misi berdagang, dan misi ini terus dijalani hingga sekarang, dengan mayoritas etnis Tionghoa berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha, menunjukkan konsistensi misi dalam hidup mereka.⁴

² Amura, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1950*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1979), hlm, 74-75.

³ Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm, 218-219.

⁴ Lukas S. Musianto, "Peran Orang Tionghoa dalam Perdagangan dan Hidup Perekonomian dalam Masyarakat", vol. 5, No. 2, September 2003, hlm, 193 – 206.

Pada abad ke-19 dan ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, pedagang Tionghoa mendapatkan posisi penting dalam ekonomi lokal, industri, perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Mereka sering dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai pemungut pajak dan perantara antara pemerintah dengan penduduk pribumi dalam bidang ekonomi.⁵

Twang Pek Yang mengklasifikasikan karakteristik perdagangan Tionghoa di Indonesia selama masa revolusi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah "dangbangke," yang merujuk pada pedagang kecil yang mengalami pertumbuhan pesat selama pendudukan Jepang, umumnya berdagang barang berharga seperti emas, permata, dan opium dalam skala kecil. Kategori kedua adalah "lianho," yang merupakan gabungan firma-firma pedagang besar dengan jangkauan operasi yang lebih luas.⁶

Para pedagang tipe "dangbangke" umumnya aktif di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa, termasuk Palembang, dominan tipe "lianho". Namun, Mestika Zed mencatat bahwa "dangbangke" juga beroperasi dalam skala kecil di Palembang, berkolaborasi dengan pedagang "ngulo" di wilayah pedalaman Sumatera Selatan.⁷

Republik Indonesia memanfaatkan keahlian dan koneksi pedagang Tionghoa di Palembang, yang memiliki jaringan kuat dengan para pengusaha besar di Singapura. Saat Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947, terjalin hubungan erat antara pedagang Tionghoa di Palembang dan para pejuang Republik, termasuk Dr. A.K. Gani, wakil pemerintah pusat untuk wilayah Sumatera bagian Selatan. Meskipun berlangsung secara rahasia, kolaborasi ini terbukti sangat membantu kepentingan pemerintah Republik. Para pedagang Tionghoa tersebut dapat menjalin relasi dan bekerja sama tidak hanya dengan penguasa Republik, tetapi juga dengan kelompok-kelompok lain.

⁵ Hapsari, Retnaningtyas Dwi. "Bibit nasionalisme di kalangan penduduk Tionghoa di Indonesia." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 7.2 (2018).

⁶ Yang Haiping, "Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis", *Fuel* 86, (2007), hlm,78-88.

⁷ Jumhari. "Rakit yang Terombang-Ambing: Ambivalensi Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang pada Masa Revolusi." *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14, no, 1 (2024), hlm, 23-28.

Ketika Belanda memberlakukan blokade ekonomi, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan pedagang Tionghoa. Pedagang Tionghoa ini berperan sebagai perantara dalam perdagangan gelap, melakukan penjualan atau barter komoditas. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem barter dan melakukan penyelundupan komoditas vital seperti makanan pokok, rempah-rempah, perhiasan, dan candu. Harapannya, jumlah candu yang berhasil diselundupkan dari gudang garam dan candu milik pemerintah Hindia-Belanda dapat meringankan kesulitan yang ada.⁸

Mempertimbangkan kondisi demikian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dilakukan dengan pertempuran fisik, tetapi juga melalui berbagai strategi ekonomi yang melibatkan elemen-elemen masyarakat di berbagai lapisan. Salah satu aspek yang sering terabaikan namun memiliki peran penting dalam konteks ini adalah perdagangan gelap yang umumnya dijalankan di bawah naungan *Indonesian office* (INDOFF), yakni kantor perwakilan Pemerintah Indonesia yang ada di Singapura. Upaya ini pada akhirnya bisa memberi pemasukan bagi kas negara dan menopang biaya selama masa Revolusi tahun 1945-1949.⁹

Salah satu aspek positif dari perdagangan gelap adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan senjata dan perlengkapan lainnya untuk perjuangan melawan Belanda dan sekutu, yang memberikan kontribusi pada perlawanan bersenjata. Meskipun penting untuk perjuangan, perdagangan gelap juga menimbulkan dampak negatif. Inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari bagi banyak rakyat Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan dipertahankan, efek ekonomi dari perdagangan gelap masih dirasakan.¹⁰

⁸ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm, 227-229.

⁹ Lesta Alfatiana dan Ayu Wulandari, "Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura", *Lembaran Sejarah*, vol, 18, number 1, (2002), hlm, 44-45.

¹⁰ Yusuf Perdana Rinaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Sidoarjo: Pustaka harapan, 2019), hlm, 76-85.

Perdagangan gelap, meskipun berlawanan dengan hukum dan berisiko tinggi, memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 dan 1949. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan blokade yang diberikan oleh kekuatan kolonial Belanda.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perdagangan gelap dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1949. Melalui analisis terhadap praktik perdagangan gelap pada masa itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai cara bertahan hidup, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi perjuangan yang lebih luas. Dengan pendekatan historis, penelitian ini akan menyoroti berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi perdagangan gelap, serta bagaimana praktik ini berinteraksi dengan upaya formal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian sejarah Indonesia, khususnya dalam memahami kompleksitas perjuangan kemerdekaan yang melibatkan berbagai bentuk resistensi, termasuk melalui jalur ekonomi yang kurang terlihat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar pembahasan penulis lebih jelas dan terstruktur secara sistematis, maka penulis merangkai rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial politik, ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dan latar belakang terjadinya perdagangan gelap antara Indonesia dan pedagang Tionghoa di pulau Singapura?
2. Apa dampak dan fungsi perdagangan gelap terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1949?

¹¹ Hendaru Tri Handoro, *Membayai Republik dengan Perdagangan Gelap*.
<https://historia.id/ekonomi/articles/membayai-republik-dengan-perdagangan-gelap-6lgeY>,
Diakses pada tanggal, 12 Desember 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kondisi sosial politik Indonesia pasca kemerdekaan dan latar belakang terjadinya perdagangan gelap antara Indonesia dengan pedagang Tionghoa di pulau Singapura
2. Untuk Mengetahui dampak dan fungsi perdagangan gelap terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1949

D. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan sumber yang digunakan sebagai referensi, rujukan, dan gambaran di dalam penulisan penelitian kasus perdagangan gelap antara Indonesia dengan pedagang Tionghoa di Pulau Singapura pada masa Revolusi 1945-1949. Kajian pustaka tersebut digunakan untuk menambah wawasan dan sebagai pembanding antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis sajikan. Sumber yang dijadikan pembanding kajian ini, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul "*Sumber Dana Perang Revolusi Indonesia 1945-1949: Peperangan di Jawa dan Sumatra*" oleh Rizki Aldi Cahyono.¹²

Dalam penelitian ini Secara keseluruhan, berfokus pada aspek finansial perjuangan kemerdekaan, menyoroti bagaimana kesulitan ekonomi memaksa para pejuang untuk mencari berbagai cara, baik legal maupun ilegal, untuk membiayai peperangan, Singkatnya, jurnal Rizki Aldi Cahyono memberikan gambaran umum tentang bagaimana revolusi dibiayai, dengan perdagangan gelap sebagai salah satu instrumennya. sementara penelitian yang dikaji, "bagaimana perdagangan gelap itu beroperasi, *siapa* aktor utamanya (termasuk peran spesifik pedagang Tionghoa di Singapura), dan dampak spesifiknya dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura di era revolusi.

¹² Cahyono, Rizki Aldi. "Sumber Dana Perang Revolusi Indonesia 1945-1949: Peperangan di Jawa dan Sumatera." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 2.2 (2022): 112-124.

2. Jurnal yang berjudul “*Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura, 1947-1949*” oleh Lesta Alfatiana & Ayu Wulandari.¹³

Jurnal ini membahas tentang peran dan keterlibatan tokoh-tokoh kunci dalam aktivitas perdagangan gelap (penyelundupan) yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Singapura selama periode 1947-1949. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja individu-individu di balik layar kegiatan penyelundupan tersebut dan bagaimana peran mereka dalam membiayai perjuangan kemerdekaan. Meskipun jurnal menyebut pedagang Tionghoa, fokus utamanya adalah pada tokoh-tokoh dari pihak Pemerintah Republik. Sedangkan Penelitian yang dikaji memperdalam peran dan jaringan pedagang Tionghoa itu sendiri secara lebih ekstensif, termasuk latar belakang mereka, bagaimana mereka membangun koneksi, dan dampak perdagangan gelap dari perspektif mereka.

3. Skripsi yang berjudul “*Perdagangan Opium di Yogyakarta 1945-1949*” yang ditulis oleh Muhamad Soleh.¹⁴

Skripsi ini membahas secara mendalam fenomena perdagangan opium (sering disebut juga candu) yang terjadi di wilayah Yogyakarta selama periode Revolusi Fisik, yaitu antara tahun 1945 hingga 1949. Skripsi ini kemungkinan akan menunjukkan bahwa opium, meskipun ilegal dan memiliki dampak negatif, seringkali menjadi salah satu sumber dana "non-konvensional" yang dimanfaatkan dalam situasi darurat seperti perang kemerdekaan, terutama ketika jalur ekonomi resmi terhambat. Sedangkan penelitian yang dikaji membahas "perdagangan gelap" secara umum, yang bisa mencakup opium tetapi juga komoditas lain seperti karet, timah, kopi (dari Indonesia ke Singapura).

¹³ Alfatiana, Lesta, and Ayu Wulandari. "Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura, 1947-1949." *Lembaran Sejarah* 18.1 (2022): 43-55.

¹⁴ Soleh, Muhamad. *Perdagangan Candu di Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949*. 2017. Universitas Gadjah Mada, Skripsi S1 Ilmu Sejarah.

4. Skripsi yang berjudul “*Perdagangan Candu di Sumatera Tengah Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*” yang ditulis oleh Rafiqatul, Afwa.¹⁵

Skripsi ini berfokus pada fenomena perdagangan candu (opium) di wilayah Sumatera Tengah (yang saat itu mencakup Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Barat) selama periode Revolusi Fisik Indonesia. Secara umum, skripsi ini akan menunjukkan bahwa perdagangan candu adalah salah satu cara penting untuk membiayai perjuangan revolusi di wilayah yang strategis dan sulit dijangkau oleh kendali pusat. Sedangkan Penelitian yang dikaji berfokus membahas "perdagangan gelap" secara umum, yang meliputi berbagai komoditas (misalnya karet, timah, kopi, dsb. dari Indonesia ke Singapura; senjata, obat-obatan, kebutuhan pokok dari Singapura ke Indonesia).

5. Buku yang berjudul “*Perdagangan dan Penggunaan candu di Surakarta masa Revolusi, 1945-1950*” yang ditulis oleh Julianto Ibrahim.¹⁶

Dalam Buku ini membahas mendalam mengenai perdagangan dan penggunaan candu (opium) di wilayah Surakarta (Solo) selama periode revolusi Indonesia, yaitu dari tahun 1945 hingga 1950. Secara keseluruhan, buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran candu sebagai komoditas perdagangan ilegal dan dampaknya di tingkat lokal selama masa revolusi, menunjukkan betapa kompleksnya situasi ekonomi dan sosial pada waktu itu. Sedangkan Penelitian yang dikaji membahas "perdagangan gelap" secara umum, yang mencakup berbagai komoditas (karet, timah, kopi, dll. dari Indonesia; senjata, obat-obatan, kebutuhan pokok dari Singapura), dan Memiliki cakupan transnasional, menghubungkan Indonesia (secara umum, tidak spesifik satu kota/pulau) dengan Pulau Singapura.

¹⁵ Rafiqatul, Afwa. *Perdagangan Candu di Sumatera Tengah Pada Masa Revolusi 1945-1949*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

¹⁶ Ibrahim dan Julianto, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi, 1945-1950*. (Yogyakarta), Pustaka Pelajar, 2013, hlm 22-24.

E. Metode Penelitian

Metode, yang akarnya dari bahasa Yunani "metodos" berarti "jalan" atau "cara", merujuk pada ilmu yang mempelajari prosedur atau tahapan untuk menelusuri dan menemukan sumber sejarah guna menyusun narasi historis. Sederhananya, metode penelitian adalah studi tentang pendekatan atau cara melakukan sesuatu.¹⁷

Penelitian tentang Perdagangan gelap Indonesia dengan Pedagang Tionghoa dipulau Singapura (1945-1949), Penulis menerapkan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹⁸ Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk memperoleh sumber-sumber yang kredibel sebagai dasar penelitian. Mengingat bahwa penulisan sejarah masa lalu bergantung pada ketersediaan sumber yang relevan, peneliti menggunakan metode sejarah untuk mendapatkan sumber-sumber otentik yang memungkinkan penyusunan karya ilmiah yang objektif.

1. Heuristik

Heuristik, yang berasal dari bahasa Yunani "heuriskein" (berarti "menemukan" atau "mencari terlebih dahulu"), adalah tahap awal dalam penelitian sejarah. Tahapan ini melibatkan penjajakan, pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber sejarah, baik yang ditemukan di lokasi penelitian, berupa benda, maupun melalui wawancara lisan. Dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada fase heuristik.¹⁹

Sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Pertama, sumber tertulis adalah keterangan sejarah yang disajikan dalam format laporan tertulis, sering ditemukan pada media seperti kertas, batu, atau dinding, Kedua, sumber lisan didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh pelaku sejarah itu sendiri; namun, jenis sumber ini memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kesan, ingatan, dan interpretasi individu pelaku Sejarah, Ketiga, sumber benda merujuk

¹⁷ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm, 73.

¹⁸ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Edisi Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 23.

¹⁹ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, hal. 93.

pada benda-benda peninggalan budaya dari masa lampau, yang umumnya dikenal sebagai benda kuno.²⁰

Pada penelitian ini, penulis melakukan prosedur pencarian sumber melalui studi kepustakaan. Surat Kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* didapatkan pada website Delpher Belanda, Surat Kabar *Het Nieuws* edisi 26 September 1949 dan *Het Dagblad* edisi 4 September 1948 didapatkan pada website Delpher yang memuat surat kabar, buku, majalah, jurnal berbentuk digital berbahasa Belanda, Foto pembuatan kapal dan kapal yang akan berlabuh ke Singapura didapatkan pada website Digital Collection Perpustakaan (Khasara). Adapun sumber lainnya didapatkan melalui Artikel Jurnal dan Buku.

a. Sumber Primer

Melalui studi kepustakaan, Penulis telah menemukan sumber primer yang bisa dijadikan sumber penelitian sejarah pada penelitian ini. Dalam rentang waktu 1945-1949, sumber primer yang bisa didapatkan oleh penulis adalah sumber tulisan berupa Surat Kabar dan Benda/Visual berupa Foto pada rentang waktu tersebut.

1) Sumber Tulisan

a) Arsip

(1) Arsip No.74/WKP/SUM/48, 1948, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

(2) Arsip No. 8/SP/DV/47, 1947, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

b) Buku

(1) Rasjid, S.M. (1989). *Memoar Pejuang Republik Zaman Singapura*. Jakarta: Yayasan S.M. Rasjid.

c) Koran

(1) Surat Kabar *Het Nieuws* edisi 26 September 1949.

(2) Surat Kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* edisi 19 Juli 1946.

(3) Surat Kabar *Het Dagblad* edisi 4 Septemeber 1948.

²⁰ M. Dien Majid and Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar (Depok: Pranada Media, 2014), hal. 32.

- (4) Surat Kabar *Nieuwe Courant* edisi 10 Juni 1947.
- (5) Surat Kabar *Het Nieuwsblad* edisi 20 Oktober 1949.
- (6) Surat Kabar *Het Nieuws* edisi 2 Januari 1949.
- (7) Surat Kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* edisi 5 April 1947.
- (8) Surat Kabar *Nieuwe Haarlemsche Courant* edisi 27 Agustus 1948.
- (9) Surat Kabar *Het Dagblad* edisi 10 Oktober 1945.

d) Sumber Benda/Visual

- (1) Foto Berlabuhnya kapal yang mengangkut barang ke Singapura.
- (2) Foto Gedung INDOFF (Indonesia Office) yang beroperasi di Singapura.
- (3) Foto Anggota INDOFF (Indonesia Office) yang berada di Singapura.
- (4) Foto Pembuatan kapal yang akan digunakan untuk menyelundupkan barang.
- (5) Foto Gedung INDOFF (Indonesia Office) yang beroperasi di Singapura.
- (6) Foto Anggota INDOFF (Indonesia Office) yang berada di Singapura.

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber sejarah pendukung dan pelengkap yang tidak sezaman dengan peristiwa pada penelitian terkait. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan sumber sekunder dari beberapa penelitian seperti buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian.

- 1) *The Indonesia Revolution and the Singapore Connection 1945-1949*, Yong Mun Cheong.
- 2) *Indonesian National Revolution 1945-1950*, Anthony J.S Reid
- 3) Julianto Ibrahim, “*Candu dan Militer keterlibatan Badan- badan Perjuangan dalam Perdagangan candu di Jawa pada masa Revolusi.*”, Vol. 6, (2016), Hlm, 72.
- 4) Rafiqatul afwa, “*Perdagangan Candu di Sumatera Tengah pada masa Revolusi.*” Diss. Universitas Andalas, 2022.
- 5) Bangsa, “*Kereta Anak. Jalur Kereta Opium Jakarta: Riwayat dan tinggalan Jalur Kereta Api Cikini-Salemba-Pabrik Opium.*”, Vol. 1. Kereta Anak Bangsa, 2020.

- 6) Fathoni, Ahmad. *“Dari Opiumpacht Hingga Opiumregie: Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri, 1833-1931”*. Universitas Airlangga.
- 7) Haryono, Ganjar Tri. *Rich Like Liem Sioe Liong: Kisah Sukses Liem Sioe Liong. Anak Hebat Indonesia*, 2020.

2. Kritik

Kritik, sebagai tahap lanjutan setelah heuristik dalam metode penelitian sejarah, berfungsi untuk mengevaluasi sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Melalui proses ini, sumber-sumber tersebut diuji dan diverifikasi dengan tujuan utama memilih yang otentik. Tahap kritik ini terdiri dari dua jenis, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Hasil dari tahapan kritik ini memperkuat kredibilitas sumber-sumber yang akan dijadikan acuan utama dalam penulisan.²¹

Tahapan kritik intern berfungsi untuk menilai keaslian sumber yang didapatkan. Tujuannya adalah memastikan validitas dan kebenaran sumber tersebut untuk keperluan penelitian, serta menjamin bahwa sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.²² Kritik eksternal bertujuan untuk memverifikasi keabsahan dan keaslian sumber-sumber sejarah. Proses ini umumnya melibatkan pemeriksaan tanggal penerbitan, jenis tinta dan kertas yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan periode waktu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sumber yang diperoleh merupakan dokumen asli, salinan, atau fotokopi. Selain itu, kritik eksternal juga mempertimbangkan usia sumber sejarah dan konteks budaya pada masa tersebut.²³

Kritik eksternal bertujuan untuk mencapai validitas dan akurasi yang tinggi. Sebaliknya, kritik internal fokus pada isi dan kesaksian dari sumber. Peneliti bertanggung jawab untuk menilai kelayakan sumber sebagai acuan penelitian. Dalam melakukan kritik internal, langkah pertama adalah menentukan sifat sumber yang terkumpul. Kedua, penting untuk menganalisis penulis sumber karena mereka adalah penyedia informasi terkait. Ketiga, untuk

²¹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hal. 101.

²² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 68.

²³ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hal. 217.

mencapai objektivitas, peneliti harus membandingkan kesaksian dari berbagai sumber yang tidak saling berhubungan.²⁴

Dalam penelitian tentang Perdagangan Gelap Indonesia dengan Pedagang Tionghoa dipulau Singapura 1945-1949 Dalam penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin menerapkan tahapan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan dari lapangan.

a. Kritik Ekstern

Kritik Eksternal adalah proses memverifikasi keaslian (otentisitas) suatu sumber, untuk memastikan apakah sumber tersebut valid, asli, atau bukan tiruan. Ini juga memeriksa apakah sumber tersebut masih utuh, baik bentuk maupun isinya. Selain itu, penilaian otentisitas juga mempertimbangkan latar belakang penulis dan waktu penulisannya. Jika sumbernya adalah dokumen tertulis, perlu dilakukan penelitian terhadap jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, ungkapan, kalimat, huruf, dan kata-kata, serta aspek fisik luarnya. Proses pengujian otentisitas ini minimal dapat dilakukan melalui lima pertanyaan, diantaranya;

Pertanyaan *pertama* dalam pengujian otentisitas adalah "kapan sumber itu dibuat?". Peneliti wajib mencari tanggal pembuatan dokumen. Jika tanggal pasti tidak ditemukan, perkiraan tanggal dapat ditentukan melalui batas waktu paling awal (*terminus post quem*) dan paling akhir yang mungkin (*terminus ante quem*). Setelah perkiraan tanggal didapat, penting untuk membandingkannya dengan isi sumber guna memastikan kesesuaian dengan periode waktu atau mengidentifikasi adanya anakronisme (ketidaksesuaian zaman).

Pertanyaan *kedua* adalah "di mana sumber itu dibuat?". Peneliti perlu menelusuri asal dan lokasi pembuatan sumber untuk meyakinkan keasliannya. Penting untuk diingat bahwa lokasi pembuatan sumber bisa berbeda dengan tempat sumber tersebut disimpan atau ditemukan. Namun, jika suatu dokumen disimpan di tempat-tempat khusus seperti arsip keluarga, kantor niaga, kantor pemerintah, atau perpustakaan, hal itu dapat menimbulkan dugaan awal mengenai otentisitas sumber tersebut.

Pertanyaan *ketiga* dalam pengujian sumber adalah "siapa yang membuat sumber itu?". Ini menuntut penyelidikan mengenai kepengarangan. Setelah

²⁴ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, hal. 103.

identitas pengarang dokumen diketahui, peneliti perlu mengidentifikasi sikap, watak, pendidikan, dan informasi lain yang terkait dengan pengarang. Meskipun demikian, keaslian sumber (otentisitas) akan lebih mudah dibuktikan melalui analisis tulisan tangan, tanda tangan, jenis huruf, atau cap jempol. Pengetahuan tentang personalitas, lingkungan, dan aktivitas pengarang akan lebih relevan dan diperlukan pada tahap kritik intern.

Pertanyaan *keempat* adalah "dari bahan apa sumber itu dibuat?". Analisis material yang digunakan dapat membantu menentukan keaslian sumber. Untuk menguji otentisitas, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan, seperti kertas yang masih langka sebelum abad ke-15, tidak adanya percetakan, sulitnya menemukan pensil sebelum abad ke-16, dan munculnya kertas (India) baru pada akhir abad ke-19.

Pertanyaan *kelima* adalah "apakah sumber itu dalam bentuk asli?". Pengujian integritas sumber menjadi sangat krusial di sini. Kecacatan pada sumber, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat terjadi akibat pemalsuan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kritik teks sangat diperlukan. Perubahan atau pengurangan teks dapat muncul pada naskah yang telah disalin atau disadur berkali-kali. Peneliti harus membandingkan berbagai salinan untuk menemukan versi yang paling mendekati teks asli. Dalam banyak kasus, teks asli dapat direstorasi baik secara mendekati maupun lengkap. Selain itu, peneliti juga harus menentukan salinan mana yang paling mendekati keasliannya berdasarkan aspek waktu.²⁵

Cara kerja pada kritik ektern tersebut kemudian diterapkan dalam penelitian yang akan penulis teliti dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahapan heuristik, yakni sebagai berikut;

1) Sumber Tulisan

Surat Kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* edisi 19 Juli 1946. Pada bagian kepala/kop Surat kabar biasanya memuat tanggal penerbitan surat, begitu juga dengan surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* ini. Surat kabar tersebut pada bagian kepala/kop suratnya memuat tulisan 19 Juli 1946 yang memberikan informasi bahwa surat kabar ini diterbitkan pada waktu yang

²⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian...*, hlm, 105-107.

tertera tersebut. Surat kabar yang didapatkan oleh peneliti ini tidak menyalahi zaman dan relevan dengan zaman tersebut dimana penggunaan angka yang tertera sudah banyak digunakan pada tulisan-tulisan di tahun 1946.

Selain memuat informasi mengenai waktu penerbitan surat kabar, pada bagian kepala/kop surat juga memuat informasi mengenai lokasi pembuatan surat. Informasi tersebut tertera pada bagian kepala/kop surat *Nieuwe Winterswijkse Courant* terbitan 19 Juli 1946, yakni di Wipsraat 12, Groningen. Penulis mengetahui bahwa hal tersebut merupakan lokasi pembuatannya, karena terdapat nomor Alamat kantor sebagai tempat nama tempat pada waktu itu.

Surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* dibuat dan diterbitkan oleh Piet Jongeling. Tapi, untuk percetakannya, dicetak di perusahaan Jan Haan. Hal tersebut bisa dilihat pada bagian kepala/kop surat setelah nama surat kabarnya dan untuk nama perusahaan percetakannya dibagian pojok atas kepala/kop surat. P. Jongeling merupakan politikus asal Belanda dan penulis buku anak-anak. Ia juga adalah anggota Liga Politik Reformasi (GPV) dan Dewan Perwakilan Belanda.

Bahan pembuatan pada percetakan surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* menggunakan kertas Koran yang dicetak oleh perusahaan Jan Haan, hal tersebut relevan dengan tahun tersebut dimana percetakan dan kertasnya sudah banyak digunakan oleh Pemerintah Belanda.

Surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* ini didapatkan dalam bentuk asli yang sudah didigitalkan oleh Delper yang menyediakan akses terhadap koleksi digital surat kabar atau majalah langka, foto, gambar dan lain sebagainya dari Delper yang dikelola oleh pemerintahan Belanda. Surat kabar yang didapatkan ini tidak banyak perubahan, hanya saja warna kertas yang kekuningan menjadi warna putih. Namun, makna dan isinya masih bisa dipahami karena teks yang terlihat utuhnya lebih banyak. Melalui tahapan kritik ekstern tersebut, surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* ini layak digunakan.

2) Sumber Arsip

Arsip yang dianalisis adalah sebuah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan analisis aspek-aspek fisiknya, berikut adalah kritik ekstern untuk menentukan keaslian (otentisitas) dokumen tersebut.

Ejaan Dokumen ini menggunakan ejaan lama (Ejaan Republik), seperti "Saja" (bukan Saya), "penindjauan" (bukan peninjauan), dan "Tuan-tuan". Penggunaan ejaan ini sangat sesuai untuk dokumen yang dibuat pada tahun 1947, jauh sebelum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diresmikan pada tahun 1972.

Konteks Sejarah: Tahun 1947 adalah periode Agresi Militer Belanda I (Juli-Agustus 1947) dan masa-masa menjelang Perjanjian Renville. Pemerintah Republik Indonesia, meskipun berpusat di Yogyakarta, memiliki aktivitas penting di berbagai daerah, terutama Sumatra. Keberadaan pejabat tinggi di Bukittinggi pada periode ini sangat masuk akal secara historis.

Lokasi Eksplisit, Dokumen ini menyatakan dibuat di "Bukit tinggi" (sekarang Bukittinggi), Bukittinggi merupakan pusat pemerintahan dan perjuangan yang sangat vital bagi Republik Indonesia di Sumatra selama masa revolusi. Kota ini bahkan sempat menjadi Ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada akhir 1948. Dengan demikian, penerbitan surat resmi oleh Wakil Presiden dari Bukittinggi pada September 1947 adalah hal yang sangat mungkin dan kredibel.

Otoritas Penerbit, Surat ini dikeluarkan atas nama "WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" dengan nama "(Mohammad Hatta)" tercetak di bawahnya. Mohammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI. Isi surat yang bersifat perintah ("Saja perintahkan untuk penindjauan...") untuk melakukan inspeksi terhadap aset ekonomi vital (Tambang Ombilin dan Perkebunan) sangat sesuai dengan wewenang seorang Wakil Presiden, terutama dalam konteks mempertahankan kedaulatan ekonomi di masa perang.

Kertas dokumen tampak menguning dan usang, menunjukkan usia yang signifikan. Kondisi fisik ini konsisten dengan dokumen yang telah disimpan selama lebih dari 75 tahun. Ini bukan kertas HVS modern yang putih bersih. Dokumen memiliki struktur surat resmi yang lazim pada masanya: kop surat (meskipun sederhana), nomor surat (No. 8/SP/DV/47), perihal ("SURAT KETERANGAN"), isi, tempat dan tanggal, serta jabatan dan nama penanggung jawab.

Teks pada surat ini menunjukkan karakteristik ketikan dari mesin ketik manual. Terlihat dari jenis huruf (font) yang khas, serta tekanan tinta yang terkadang tidak seragam sempurna. Ini sangat sesuai dengan teknologi perkantoran tahun 1940-an. Dokumen modern yang dibuat dengan komputer akan memiliki teks yang jauh lebih rapi dan seragam.

Terdapat notasi "ttd." (tertanda) yang mengindikasikan bahwa di dokumen aslinya terdapat tanda tangan basah di atas nama yang diketik. Ini adalah praktik standar dalam surat-menyurat resmi.

Kemungkinan besar dokumen ini asli (otentik). Sangat sulit bagi seorang pemalsu untuk mereplikasi semua elemen secara konsisten: ejaan lama yang tepat, konteks historis yang akurat (lokasi dan waktu), format surat resmi zaman itu, hingga karakteristik fisik seperti jenis kertas dan hasil ketikan manual. Surat ini merupakan sumber primer, yaitu kesaksian langsung dari periode yang bersangkutan, yang dibuat oleh pelaku sejarah (dalam hal ini, institusi Wakil Presiden).

Arsip ini bisa jadi merupakan dokumen original atau salinan karbon (carbon copy) yang dibuat pada saat yang bersamaan. Salinan karbon adalah praktik umum pada zaman mesin ketik. Tanpa memeriksa dokumen fisiknya secara langsung (misalnya, untuk melihat bekas tekanan pulpen pada tanda tangan), sulit untuk memastikan 100% apakah ini lembar pertama atau salinannya, namun keduanya tetap dianggap sumber primer yang otentik dari masa itu.

b. Kritik Intern

Kritik Intern merupakan pengujian keabsahan mengenai kesahihan sumber atau kredibilitas yang menekankan pada aspek dalam yaitu isi dari sumber. Cara kerja pada kritik intern ini dilakukan untuk menemukan kesaksian sumber yang dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak berdasarkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya;

Pertama, mengidentifikasi isi sumbernya apakah sumber tersebut resmi atau bukan. Apabila dokumen bisa dilihat pada bagian kepala/kop surat yang dibandingkan dengan sumber dokumen lainnya baik yang sama hanya berbeda edisi atau dengan dokumen lain yang berbeda namun dibuat pada tahun yang sama.

Kedua, peneliti harus mampu Selanjutnya, penting untuk memahami makna sebenarnya dari kesaksian, yaitu apa yang ingin disampaikan oleh saksi atau penulis. Hal ini krusial karena bahasa bersifat dinamis dan terus berkembang, menyebabkan suatu kata dapat memiliki dua pengertian: arti harfiah dan arti sesungguhnya.

Ketiga, kredibilitas saksi harus ditegakkan dengan menunjukkan kompetensi verasitas (kebenaran) apakah saksi mempunyai kapasitas untuk menyampaikan itu atau tidak dan apakah saksi menyampaikannya dengan jujur atau tidak.²⁶ Apabila mampu menunjukkan tiga penyidikan tersebut dengan benar maka sumber tersebut kredibel untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

1) Sumber Tulisan

Surat Kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* edisi 19 Juli 1946. Surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* yang diterbitkan ini merupakan surat kabar resmi dari *Nieuwe Winterswijkse Courant* karena pada bagian atas surat kabar terdapat nama surat kabar tersebut yakni *Nieuwe Provinciale Groninger Courant* yang menegaskan bahwa ini terbitan asli dari surat kabar tersebut.

Kesaksian yang ditulis pada surat kabar tersebut, Piet Jongeling bermaksud memberitahu bahwa surat kabar *Nieuwe Winterswijkse Courant* merupakan

²⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian...*, hlm,104.

surat kabar harian yang disampaikan baik melalui tulisan-tulisan kecil yang disisipkan maupun tulisan yang besar dan artikel-artikel dalam Bahasa Belanda seperti berita harian dan lainnya.

Kredibilitas pembuat tulisan-tulisan pada surat kabar tersebut memiliki kompetensi dan kejujuran, karena Piet Jongeling merupakan seorang jurnalis pada tahun 1941.

2) Sumber Arsip

Secara harfiah, surat Arsip ini adalah perintah dari Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada sebuah tim yang dipimpin oleh R. Surianataatmadja (Inspektur Perkebunan) dan Mr. A. Karim (Sekretaris Direktur Bank Indonesia) untuk melakukan "peninjauan" atau inspeksi terhadap dua aset ekonomi yang sangat vital: Tambang Ombilin dan Perkebunan di Daerah Sumatera Barat.

Kalimat kunci dalam surat ini adalah, *"Saja harap supaya sekalian Pembesar dan Pegawai Pemerintah Republik, tentara maupun Sipil, memberikan bantuan dan pertolongan kepada Tuan-tuan tersebut, dimana perlu."* Kalimat ini bukan sekadar harapan, melainkan sebuah instruksi yang memberikan mandat luas dan kuat kepada tim inspeksi. Ini menunjukkan bahwa misi mereka dianggap sangat penting dan harus didukung oleh semua elemen kekuatan Republik di wilayah tersebut, baik sipil maupun militer.

Surat ini dikeluarkan hanya sekitar satu bulan setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda I (21 Juli - 5 Agustus 1947). Dalam agresi tersebut, Belanda berhasil merebut banyak wilayah ekonomi penting milik Republik, terutama di Jawa dan sebagian Sumatera.

Sebagai penulis, Mohammad Hatta memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Beliau dikenal sebagai seorang administrator ulung, negarawan yang jujur, dan memiliki perhatian besar pada bidang ekonomi. Surat yang dikeluarkan atas namanya memiliki bobot perintah yang tidak diragukan.

3. Interpretasi

Setelah tahapan heuristik dan kritik selesai, peneliti melanjutkan ke tahap interpretasi. Dalam konteks sejarah, fakta-fakta yang ditemukan sangatlah terbatas, tidak dapat direplikasi, maupun diulang sesuai kehendak.²⁷ Dalam kondisi ini, sejarawan diharapkan mampu menggambarkan atau menginterpretasikan peristiwa berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh.²⁸ Interpretasi haruslah bersifat mandiri, artinya ia menggunakan kemampuan untuk menguraikan fakta sejarah dan relevansi topik sejarah, sekaligus menjelaskan isu-isu kontemporer.²⁹ Penafsiran, atau interpretasi sejarah, bertujuan untuk menyatukan berbagai fakta yang didapat dari sumber sejarah dan menyusunnya bersama teori menjadi sebuah interpretasi yang komprehensif.³⁰

Dalam interpretasi pada bahasan ini penulis menggunakan pendekatan teori Ekonomi Politik yang digagas oleh Copeland, D. Dalam gagasannya, Copeland menekankan bahwa dalam keadaan krisis, seperti yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan, aktor-aktor politik (baik negara maupun non-negara) cenderung menggunakan instrumen ekonomi alternatif untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Perdagangan gelap menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekurangan barang-barang penting akibat embargo dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan seluruh jalur distribusi barang. Dalam analisis ini, dapat dilihat bahwa perdagangan gelap bukan hanya respons terhadap keadaan ekonomi yang tertekan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan negara yang baru merdeka.³¹

Perdagangan gelap yang terjadi pada periode 1945-1949 di Indonesia memiliki makna yang mendalam, baik dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Perdagangan gelap ini tidak hanya terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan barang, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonial Belanda. Dalam konteks ini, teori

²⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian...*, hlm, 107.

²⁸ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Prakti*, (Gresik: JSI Press, 2020), hlm, 35.

²⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian...*, hlm, 107.

³⁰ Sulasman, *Metodologi Penelitian...*, hlm, 111.

³¹ Copeland dan Dale C, *Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations*, (Cambridge: The MIT Press, 1996), hlm, 5-41.

ekonomi politik Copeland sangat relevan untuk menganalisis bagaimana faktor ekonomi dan politik saling terkait dalam pembentukan sistem perdagangan ilegal ini.

Teori ekonomi politik Copeland berfokus pada hubungan antara kekuasaan politik, struktur ekonomi, dan keputusan ekonomi yang diambil oleh berbagai aktor dalam suatu negara. Teori ini memungkinkan kita untuk melihat perdagangan gelap sebagai bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang lebih luas, di mana aktor-aktor dalam dan luar negeri saling berinteraksi dalam sebuah sistem ekonomi dan politik yang penuh ketegangan.

Salah satu konsep utama dalam teori ekonomi politik Copeland adalah bagaimana kebijakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari hubungan internasional. Ketika Indonesia berusaha mengembangkan kebijakan ekonomi domestiknya, kekuatan internasional, terutama Belanda dan sekutunya, berusaha untuk mengisolasi Indonesia secara ekonomi. Ini menunjukkan bagaimana ekonomi internasional sangat mempengaruhi kebijakan domestik, di mana negara yang merdeka seperti Indonesia berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar global melalui jalur perdagangan gelap.

Perdagangan gelap selama masa ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar, meskipun negara-negara besar dan pihak-pihak internasional berusaha menghalangi akses tersebut. Teori Copeland membantu menjelaskan bagaimana negara yang baru merdeka seperti Indonesia terpaksa membentuk sistem ekonomi yang tidak bergantung pada sistem perdagangan internasional yang dominan, melainkan menciptakan jalur-jalur perdagangan yang lebih fleksibel dan seringkali ilegal untuk mendukung tujuan politiknya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan akhir dalam proses penulisan sejarah, di mana fakta-fakta dan sumber-sumber yang telah melalui seleksi disusun menjadi narasi sejarah. Setelah menafsirkan data, sejarawan wajib mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisan mereka, serta memastikan bahwa pokok-pokok

pemikiran yang diajukan mudah dipahami oleh pembaca.³² Historiografi merupakan tahapan akhir penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan. Pada tahapan ini penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang Penulisan Penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu;

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Langkah-langkah Penelitian.

BAB II menguraikan kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk dampak blokade Belanda, peran pedagang Tionghoa, dan posisi Singapura sebagai pusat penyelundupan ..

BAB III menganalisis dampak dan fungsi krusial perdagangan gelap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meliputi jenis komoditas yang diselundupkan (seperti gula, kopi, teh, karet, emas, dan candu), perolehan senjata dan peralatan militer, modus dan jalur penyelundupan (laut dan udara), serta tokoh-tokoh dan organisasi yang terlibat . Bab ini juga akan membahas respons Belanda terhadap perdagangan gelap dan respons Republik Indonesia dalam menembus blokade. Selain itu, alokasi hasil perdagangan gelap akan dijelaskan, mencakup pembiayaan operasi militer, dukungan diplomasi, serta pemenuhan kebutuhan sipil dan gaji pegawai.

BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian ini, merangkum temuan-temuan utama mengenai dampak dan fungsi perdagangan gelap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

³² Sulasman, *Metodologi Penelitian.....*, hlm, 147.